

## RISET DAN INOVASI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020-2025

No.	Judul	Abstrak	Tautan Video
<b>A. Kegiatan Riset</b>			
<b>2022</b>			
1.	Penelitian dan Pengembangan Agrowisata	<p>Kabupaten Pelalawan, yang terletak di sepanjang Sungai Kampar, memiliki potensi besar untuk pengembangan agrowisata berkelanjutan. Namun, tantangan geografis seperti dominasi lahan gambut yang rentan banjir dan kerusakan lingkungan menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memetakan potensi agrowisata di Kecamatan Langgam, Teluk Meranti, dan Kuala Kampar—wilayah dengan lahan pertanian luas dan komoditas unggulan berbasis budaya Melayu. Metode yang digunakan meliputi pendekatan deskriptif, Analytic Hierarchy Process (AHP), dan analisis geospasial overlay. AHP digunakan untuk memprioritaskan tujuh kriteria utama: kedalaman gambut, aksesibilitas, jenis tanah, tata guna lahan, demografi, jenis usaha produktif, dan kapasitas sumber daya manusia. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder mencakup informasi geofisik dan risiko banjir. Analisis geospasial menghasilkan klasifikasi kesesuaian lahan: direkomendasikan, sesuai, agak sesuai pada kawasan permukiman. Lokasi indikatif yang sesuai dan layak dan dari sisi kesesuaian lahan juga layak. Dari sisi kelayakan keuangan maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kelayakan keuangan yang berlaku. ggam menonjol sebagai wilayah paling potensial, didukung oleh lokasi strategis, keragaman usaha, dan kesiapan SDM. Teluk Meranti dan Kuala Kampar juga menjanjikan, namun membutuhkan peningkatan akses dan kapasitas SDM. Temuan ini menjadi dasar strategis bagi pengembangan agrowisata berkelanjutan di Pelalawan, mendukung program "Pelalawan Sejuk" dan kebijakan pariwisata ramah lingkungan nasional.</p>	
2.	Kajian Industri Kelapa di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	<p>Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kuala Kampar, memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kelapa terpadu yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengembangan industri kelapa dari berbagai aspek situasional, manajerial, pasar, finansial, serta dampak sosial dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui wawancara, observasi lapangan, studi literatur, dan analisis data sekunder.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun industri kelapa di Kuala Kampar menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya minat generasi muda, dan usia pohon kelapa yang tidak produktif, peluang pengembangan tetap terbuka lebar. Analisis SWOT mengindikasikan kekuatan internal dan peluang eksternal yang signifikan, terutama dukungan pemerintah, potensi pasar ekspor, dan budaya lokal yang mendukung. Strategi ekspansi usaha dinilai paling tepat, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, diversifikasi, dan promosi pasar.</p> <p>Dari sisi finansial, industri kelapa terpadu menunjukkan kelayakan investasi yang kuat dengan nilai NPV sebesar Rp 3,49 miliar, IRR 27,67%, dan payback period 3,53 tahun. Analisis sensitivitas juga menunjukkan ketahanan terhadap fluktuasi harga. Kajian UKL-UPL menegaskan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Secara keseluruhan, pengembangan industri kelapa terpadu di Kuala Kampar berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, dengan syarat adanya kolaborasi lintas sektor dan strategi inovatif yang adaptif terhadap tantangan.</p> <p>Kata kunci: Industri kelapa terpadu, kelayakan investasi, SWOT, UKL-UPL, Kuala Kampar, pembangunan berkelanjutan</p>	
3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	<p>Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi dan fakta tentang kekerasan pada anak khususnya Anak Berhadapan Hukum (ABH) baik anak sebagai korban kekerasan, saksi maupun anak sebagai pelaku pelanggaran hukum. Adapun tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan sensitifitas pemerintah dan masyarakat tentang hak anak yang tertuang di undang undang perlindungan anak sehingga indikator bagi penyusun perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat serta aparat tentang hak-hak anak yang berkonflik hukum ( Anak Sebagai Pelaku).</p>	
4.	Studi Kelayakan Industri Hilir Sawit	<p>Industri minyak sawit Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Selain sebagai komoditas penghasil devisa terbesar, kontribusinya pada perekonomian nasional relatif besar dan luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan wilayah, alih teknologi, aliran masuk investasi hingga kontribusinya sebagai salah satu kekuatan andalan dalam penerimaan pendapatan pemerintah daerah dan pusat. Kelapa sawit sendiri menyandang status sebagai tanaman penghasil minyak nabati tertinggi. Industri kelapa sawit memenuhi kriteria sebagai industri unggulan yang pantas untuk dikembangkan lebih luas lagi, dari mulai hulu hingga ke hilir. Apalagi kelapa sawit mempunyai kemampuan menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri pengolahan. Selama ini, CPO masih menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia. Untuk industri hulu kelapa sawit, limbah padat yang dihasilkan pabrik kelapa sawit dapat dibuat pupuk kompos yang mana dapat menunjang UMMK berbasis kelapa sawit. Hilirisasi CPO perlu didorong untuk diolah menjadi produk- produk bernilai tambah lebih tinggi. Hilirisasi CPO di provinsi Riau mempunyai potensi untuk dikembangkan karena Riau adalah provinsi yang memiliki perkebunan sawit terluas, dan banyak perusahaan CPO berada di Riau. Ada tiga jalur hilirisasi yang dapat dilakukan, yaitu oleofood (oleofood complex), oleochemical complex, dan biofuel complex. Untuk tahapan hilirisasi yang dapat dilakukan adalah untuk jangka pendek dilakukan dengan fokus pada optimalisasi kapasitas terpasang, peningkatan kapasitas refinery dan biodiesel, dan penguatan iklim usaha investasi. Untuk jangka menengah fokus pada produk hilir dengan "distinctive aspect" untuk mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kecukupan nutrisi masyarakat. Untuk Jangka Panjang fokus pada produk canggih sawit sebagai substitusi produk sejenis yang tidak terbarukan (non-renewable, green products).</p>	
5.	Studi Kelayakan Industri Konveksi	<p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan industri konveksi di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Jika yang diperlukan data kuantitatif dibutuhkan maka proses selanjutnya adalah mengualitifikasikan data tersebut. Sumber data yang dipergunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari kajian kelayakan perancangan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari analisis kelayakan pasar di Kabupaten Pelalawan merupakan pasar potensial untuk pengembangan industri konveksi. Dari analisis teknis, disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala teknis dari sisi bahan baku maupun luasan lokasi pabrik yang akan dibangun. Dari analisis kelayakan manajemen, disimpulkan bahwa tersedia tenaga kerja dan bahan baku yang berkelanjutan. Dari analisis kelayakan lokasi, disimpulkan bahwa Lokasi di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sesuai dengan kebijakan pola ruang serta pengaturan zonasi yaitu diijinkan secara bersyarat pada kawasan permukiman. Lokasi indikatif yang sesuai dan layak dan dari sisi kesesuaian lahan juga layak. Dari sisi kelayakan keuangan maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kelayakan keuangan yang berlaku.</p>	
6.	Studi Kelayakan Industri Percetakan	<p>Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pelalawan sehingga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Penelitian ini menggunakan metode alitatif. Oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Jika yang diperlukan data kuantitatif dibutuhkan maka proses selanjutnya adalah mengualitifikasikan data tersebut.</p> <p>Sumber data yang dipergunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari kajian kelayakan percetakan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari analisis kelayakan pasar di Kabupaten Pelalawan merupakan pasar potensial untuk pengembangan industri percetakan. Dari analisis teknis, disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala teknis dari sisi bahan baku maupun luasan lokasi pabrik yang akan dibangun. Dari analisis kelayakan manajemen, disimpulkan bahwa tersedia tenaga kerja dan bahan baku yang berkelanjutan. Dari analisis kelayakan lokasi, disimpulkan bahwa Lokasi di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sesuai dengan kebijakan pola ruang serta pengaturan zonasi yaitu diijinkan secara bersyarat pada kawasan permukiman. Lokasi indikatif yang sesuai dan layak dan dari sisi kesesuaian lahan juga layak. Dari sisi kelayakan keuangan maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kelayakan keuangan yang berlaku.</p>	
7.	Studi Kelayakan Sentra Batik	<p>Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pelalawan sehingga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Penelitian ini menggunakan metode alitatif. Oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Jika yang diperlukan data kuantitatif dibutuhkan maka proses selanjutnya adalah mengualitifikasikan data tersebut.</p> <p>Sumber data yang dipergunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari kajian kelayakan percetakan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari analisis kelayakan pasar di Kabupaten Pelalawan merupakan pasar potensial untuk pengembangan industri percetakan. Dari analisis teknis, disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala teknis dari sisi bahan baku maupun luasan lokasi pabrik yang akan dibangun. Dari analisis kelayakan manajemen, disimpulkan bahwa tersedia tenaga kerja dan bahan baku yang berkelanjutan. Dari analisis kelayakan lokasi, disimpulkan bahwa Lokasi di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sesuai dengan kebijakan pola ruang serta pengaturan zonasi yaitu diijinkan secara bersyarat pada kawasan permukiman. Lokasi indikatif yang sesuai dan layak dan dari sisi kesesuaian lahan juga layak. Dari sisi kelayakan keuangan maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kelayakan keuangan yang berlaku.</p>	
8.	Studi Kelayakan Sentra Madu Kabupaten Pelalawan	<p>Tujuan dari studi kelayakan usaha sentra madu Pelalawan adalah untuk meningkatkan skala industri madu di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, memaksimalkan hasil madu sialang di kabupaten pelalawan Provinsi Riau, dan untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.</p> <p>Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari pelaku usaha, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat baik wawancara dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung penelitian yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti artikel, jurnal, bahan baca dari internet dan laporan dari instansi pemerintahan terkait serta data laporan keuangan dari usaha sentra madu ini. Sesuai kajian tentang Kajian Studi Kelayakan sentra madu di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau merekomendasikan adalah: 1. Skala industri madu perlu ditingkatkan dengan membangun sentra madu yang representative dan bekerjasama berbagai pihak memajukan industry madu di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 2. Menertibkan aturan main pengelolaan bahan baku dan rantai pasok yang saling menguntungkan semua pihak. 3. Mencari Potensi objek pariwisata yang strategis dan singkron dengan membangun sentra madu sialang di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.</p>	

9.	Studi Kelayakan Pembangunan TPA Sampah Kecamatan Kuala Kampar	<p>Tujuan dari kegiatan penyusunan studi kelayakan pembangunan TPA Kecamatan Kuala Kampar adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung pengelolaan tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produk sampah yang dihasilkan. Berdasarkan Kesimpulan dari syarat lokasi TPA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan SNI 03-3241-1994 dari tabel di atas maka calon lokasi TPA di Kecamatan Kuala Kampar dinyatakan dinyatakan TIDAK LAYAK secara teknis.</p> <p>Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak layakan Pembangunan TPA di Calon Lokasi yang tersedia di Dusun Batangmal Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berada di kawasan rawan banjir ( terletak di daerah pesisir)</li> <li>❖ Berada di daerah rawan abrasi</li> <li>❖ Dekat dengan pemukiman penduduk dan pusat pelayanan/kegiatan</li> <li>❖ Tidak tersedianya tanah penutup</li> <li>❖ Usia pakai TPA &lt; 5 Tahun</li> <li>❖ Berada di daerah yang produktif untuk pertanian masyarakat</li> <li>❖ Belum tercakup kedalam Perencanaan Daerah yang tertuang di dalam RTRW Kab. Pelalawan 2019 - 2039.</li> </ul>	
10.	Peta Potensi Investasi Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 2022	<p>Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk mengelola potensi sumber daya lokal guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Pelalawan, sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Riau, memiliki kekayaan sumber daya alam dan peluang investasi yang signifikan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan peta potensi investasi yang sistematis, akurat, dan mudah diakses. Kegiatan ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi dan memetakan potensi investasi unggulan di tiap kecamatan secara spasial dan sektoral, Menyediakan basis data investasi daerah yang terintegrasi dengan Portal Investment Regional (PIR) BKPM RI, Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi berbasis data dan teknologi informasi, dan Wilayah kajian utama meliputi Kecamatan Bunut, Pangkalan Lesung, dan Pelalawan sebagai kawasan prioritas pengembangan. Pendekatan dilakukan secara bottom-up (berdasarkan potensi daerah dan masukan pemangku kepentingan) serta top-down (mengacu pada RPJMD dan kebijakan strategis nasional). Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi teknis dan pelaku usaha; Survei lapangan dan pemetaan berbasis GIS; dan Analisis ekonomi dan kelayakan investasi (LQ, kontribusi sektor, serta studi kelayakan usaha). Peta Potensi Investasi Kabupaten Pelalawan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menggambarkan lokasi, potensi sumber daya, infrastruktur, dan peluang investasi di setiap kecamatan. Database digital investasi daerah yang terhubung dengan PIR BKPM, memudahkan akses informasi bagi calon investor. Identifikasi sektor unggulan daerah, antara lain: Perkebunan dan industri hilir kelapa sawit, Pertanian dan olahan hasil bumi (kakao, kelapa, pinang, sagu), Peternakan (sapi potong, kambing, SISKAN), Perikanan dan pengolahan hasil laut/darat, dan Pariwisata unggulan seperti Ombak Bono, Istana Sayap, dan Taman Nasional Tesso Nilo. Penyusunan peta potensi investasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong promosi dan realisasi investasi di Kabupaten Pelalawan. Hasilnya memberikan: Instrumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis data spasial, Panduan bagi investor dalam memilih peluang investasi yang layak dan prospektif, dan Dukungan kebijakan daerah untuk meningkatkan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.</p>	
2023			
1.	Kajian Industri Kelapa di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	<p>Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kuala Kampar, memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kelapa terpadu yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengembangan industri kelapa dari berbagai aspek situasional, manajerial, pasar, finansial, serta dampak sosial dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui wawancara, observasi lapangan, studi literatur, dan analisis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun industri kelapa di Kuala Kampar menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya minat generasi muda, dan usia pohon kelapa yang tidak produktif, peluang pengembangan tetap terbuka lebar. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan internal dan peluang eksternal yang signifikan, terutama dukungan pemerintah, potensi pasar ekspor, dan budaya lokal yang mendukung. Strategi ekspansi usaha dinilai paling tepat, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, diversifikasi, dan promosi pasar. Dari sisi finansial, industri kelapa terpadu menunjukkan kelayakan investasi yang kuat dengan nilai NPV sebesar Rp 3,49 miliar, IRR 27,67%, dan payback period 3,53 tahun. Analisis sensitivitas juga menunjukkan ketahanan terhadap fluktuasi harga. Kajian UKL-UPL menegaskan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pemberdayaan masyarakat.</p>	
2.	Studi Kelayakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kecamatan Pangkalan Kuras	<p>Tujuan dari kegiatan penyusunan studi kelayakan pembangunan TPST Kecamatan Pangkalan Kuras adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung pengelolaan tersebut di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produk sampah yang dihasilkan. Calon lokasi rencana pembangunan TPST yang terletak di Desa Sorek Satu, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras LAYAK secara teknis untuk dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan faktor pendukung utama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan kecukupan luasan lahan yang tersedia</li> <li>• Status kepemilikan lahan</li> <li>• Kondisi alam dan ketata ruangan</li> <li>• Kondisi Geologi dan Geohidrologi</li> <li>• Usia pakai lahan cukup panjang berdasarkan perencanaan</li> <li>• Menjadi prioritas pembangunan daerah (Tertuang di dalam RPJM)</li> </ul>	
3.	Studi Kelayakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kecamatan Bandar Petalangan	<p>Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah Hasil Dokumen Studi (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Bandar Petalangan; Menentukan potensi lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Kecamatan Bandar Petalangan berdasarkan kaidah teknis yang berlaku. Dari kegiatan studi kelayakan pengelolaan sampah Kec. Bandar Petalangan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bandar Petalangan layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengolahan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Bandar Petalangan layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Bandar Petalangan pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 13-20 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah setidaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Bandar Petalangan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST) Kecamatan Bandar Petalangan telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Unit yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Bandar Petalangan, sedangkan di Ibu Kota Kecamatan (Kelurahan Rawang Empat) akan direncanakan sebagai Titik Bank Sampah Induk yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST. Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Bandar Petalangan yang tertuang di dalam Rencana Induk Persampahan Kab. Pelalawan tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman dan pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 450 m dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan berjarak +/- 250 m dari pemukiman terdekat. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari pemukiman terdekat. Lokasi terpilih dan ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acuan pada kajian ini untuk loikasi calon lahan untuk pembangunan.</p> <p>Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Bandar Petalangan adalah di Desa Tambun yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kerumutan. Pemilihan lokasi Desa Tambun sebagai area lahan pembangunan TPST Kecamatan Bandar Petalangan telah mempertimbangkan setidaknya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lahan terpilih berada di dalam area pelayanan (Kec. Bandar Petalangan)</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 500 m dari pemukiman penduduk terdekat</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 10 Km ke Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kec. Bandar Petalangan</li> <li>❖ Kawasan area terpilih tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi.</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 10 Km dari sumber air komersial yang digunakan untuk pelayan publik (sumber air UPT SPAM Kec. Bandar Petalangan)</li> <li>❖ Lahan terpilih berada pada zona lahan yang relatif datar dengan kemiringan lahan diperkirakan &lt; 20%.</li> <li>❖ Lahan terpilih tidak Berada di dan atau berdekatan dengan kawasan lindung dan cagar budaya .</li> </ul>	
4.	Studi Kelayakan Pengolahan Sampah Kecamatan Seikijang	<p>Tujuan dari kegiatan penyusunan studi kelayakan pembangunan TPST Kecamatan Bandar Seikijang adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung pengelolaan tersebut di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produk sampah yang dihasilkan. Dari kegiatan studi kelayakan pengelolaan sampah Kec. Seikijang dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Seikijang layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengolahan dan pengolahansampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan KecamatanSeikijang layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Kecamatan Seikijang merupakan kecamatan penghubung antara Ibukota Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) dengan Ibu Kota Kabupaten Pelalawan (Kota Pangkalan Kerinci), sehingga Kecamatan Sikiang berpotensi memiliki pertumbuhan yang pesat yang berpengaruh kepada ertumbuhan penduduk dan timbulan sampah yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk tersebut. Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Seikijang pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 16-20 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah setidaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Seikijang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST) D. Kecamatan Seikijang telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Induk yang direncanakan berada pada 3 (tiga) titik yang tersebar di Desa Muda Setia, Desa Kiyap Jaya, dan Desa Lubuk Ogung, sedangkan di Ibu Kota Kecamatan (Kelurahan Seikijang) akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah unit yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST.E.</p>	

		<p>Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Seikijang yang tertuang di dalam Rencana Induk Persampahan Kab. Pelalawan tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman dan pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 2 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan berjarak +/- 200 m dari permukiman terdekat. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari permukiman terdekat. Lokasi terpilih di ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Seikijang adalah di Desa Lubuk Ogung bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Langgam Pemilihan lokasi Desa Lubuk Ogung sebagai area lahan pembangunan TPST Kecamatan Seikijang telah mempertimbangkan setidaknya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lahan terpilih berada di dalam area pelayanan (Kec. Seikijang)</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 500 m dari permukiman penduduk terdekat</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 10 Km ke Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kec. Seikijang</li> <li>❖ Kawasan area terpilih tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi.</li> <li>❖ Jarak area terpilih &gt; 10 Km dari sumber air komersial yang digunakan untuk pelayan publik (sumber air UPT SPAM Kec. Seikijang)</li> <li>❖ Lahan terpilih berada pada zona lahan yang relatif datar dengan kemiringan lahan diperkirakan &lt; 20%.</li> <li>❖ Lahan terpilih tidak Berada di dan atau berdekatan dengan kawasan lindung dan cagar budaya .</li> </ul>	
5.	Studi Kelayakan Kecamatan Pangkalan Lesung	<p>Tujuan dari Jasa Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Pangkalan Lesung adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung di Kecamatan Pangkalan Lesung ini serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan. Dari kegiatan studi kelayakan pengelolaan sampah Kec. Pangkalan Lesung dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pangkalan Lesung layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Pangkalan Lesung layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Pangkalan Lesung pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 18-23 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah selindaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Kecamatan Pangkalan Lesung telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Unit yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Pangkalan Lesung, sedangkan di Ibu Kota Kecamatan (Kelurahan Pangkalan Lesung) akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah Induk yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST.</p> <p>Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Pangkalan Lesung yang tertuang di dalam Rencana Induk Persampahan Kab. Pelalawan tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman dan pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 8 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan berjarak +/- 850 m dari permukiman terdekat. Untuk syarat jarak dengan pemukiman terdekat memenuhi persyaratan. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari permukiman terdekat. Rencana lokasi pembangunan TPST Kec. Pangkalan Lesung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041 berada pada satu area dengan lahan rencana pembangunan Kebun Raya Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung. Lokasi terpilih di ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Pangkalan Lesung adalah di Kelurahan Pangkalan Lesung sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui.</p>	
6.	Studi Kelayakan Pengolahan Sampah Kecamatan Teluk Meranti	<p>Penyusunan studi kelayakan pengelolaan sampah Kecamatan Teluk Meranti adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung pengelolaan tersebut di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (pengelolaan sampah) serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produk sampah yang dihasilkan. Kecamatan Teluk Meranti layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan dengan konsep pengelolaan yang lebih mikro yaitu dengan konsep TPS3R. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Teluk Meranti layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Teluk Meranti pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 10-13 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah selindaknya pengelolaan sampah selindaknya dengan konsep TPS3R. Kecamatan Teluk Meranti telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Unit yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Teluk Meranti, sedangkan di Ibu Kota Kecamatan (Kelurahan Teluk Meranti) akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah Induk yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPS3R. Lokasi terpilih di ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS3R) Kecamatan Teluk Meranti adalah di Kelurahan Teluk Meranti. Dikarenakan mayoritas lahan Kecamatan Teluk Meranti merupakan lahan berjenis tanah gambut, maka untuk pengelolaan sampah secara makro tidak dapat atau tidak layak dibangun pengelolaan sampah dengan jenis pengelolaan TPST dan TPA. Pembangunan fasilitas TPS3R di Kecamatan Teluk Meranti tidak disarankan dibangun dilahan pesisir dan harus memperhatikan kawasan pasang yang rentan terhadap gelombang dan banjir tahunan yang disebabkan luapan sungai kampar. Dikarenakan di Kecamatan Teluk Meranti direncanakan dibangun Bank Sampah sebagai penunjang pengelolaan persampahan maka untuk pengelolaan sampah secara makro dengan konsep pengelolaan minimal TPST dapat dilakukan secara Komunal Kecamatan dengan kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Bunut.</p>	
<b>2024</b>			
1.	Inovasi Pangan Fungsional Berbasis Daun Kelor; Pengembangan Daun Kelor Sebagai Sumber Pangan Alternatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi pangan fungsional berbasis daun kelor sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pelalawan. Kolaborasi antara BRIDA Pelalawan dan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia menghasilkan dua produk utama: nugget ikan patin-kelor dan bubur bayi instan patin-kelor. Penelitian dilakukan selama empat bulan dengan pendekatan eksperimental menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) non-faktorial, serta analisis kimia dan sensoris terhadap produk yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor meningkatkan kadar protein dan memperbaiki mutu nutrisi produk, meskipun kadar air pada nugget belum sepenuhnya memenuhi standar SNI. Bubur bayi instan dengan formulasi optimal menunjukkan kandungan gizi yang tinggi dan tingkat kesukaan yang baik berdasarkan uji hedonik. Daun kelor terbukti kaya akan vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif seperti flavonoid, menjadikannya bahan pangan lokal yang potensial untuk fortifikasi. Analisis sensori dan angka lending total menunjukkan bahwa produk aman dikonsumsi dan diterima oleh masyarakat. Strategi pemanfaatan sumber daya lokal seperti daun kelor dan ikan patin dapat memberikan solusi gizi yang terjangkau dan berkelanjutan. Penelitian ini mendukung program Pelalawan Emas dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pangan fungsional untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya balita.</p>	
2.	Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Kerumutan	<p>Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Kerumutan adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung dan bisa diterapkan di Kecamatan Kerumutan ini serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan. Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Kerumutan pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 20 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah selindaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Kecamatan Kerumutan telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Induk yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Kerumutan, sedangkan di Kelurahan Kerumutan akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah unit yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST. Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Kerumutan yang diusulkan dalam Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman terdekat dan memenuhi syarat terhadap jarak ke pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 10 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 50 m dari permukiman terdekat. Untuk syarat jarak dengan pemukiman terdekat tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari permukiman terdekat. STUDI KELAYAKAN (FS) PENGOLAHAN SAMPAH KEC. KERUMUTAN. Lokasi yang diusulkan dan ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Kerumutan adalah di Kelurahan Kerumutan kawasan bagian selatan.</p>	
3.	Studi Kelayakan Pengolahan Sampah Kecamatan Langgam	<p>Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Langgam adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung dan bisa diterapkan di Kecamatan Langgam ini serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan. Kecamatan Langgam layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Langgam layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; 1. Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Langgam pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 31 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah selindaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). 2. Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Langgam merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST) 3. Kecamatan Langgam telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Induk yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Langgam, sedangkan di Desa Langkan akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah unit yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST. 4. Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Langgam yang diusulkan oleh pemerintah Kecamatan Langgam tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman terdekat dan memenuhi syarat terhadap jarak ke pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 13 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 75 m dari permukiman terdekat. Untuk syarat jarak dengan pemukiman terdekat tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari permukiman terdekat. 5. Lokasi yang diusulkan dan ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Langgam adalah di Desa Segai Bagian Barat dan Desa Pangkalan Gondai Bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pangkalan Kuras.</p>	

4.	Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Pelalawan	<p>Tujuan dari Jasa Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Pelalawan adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung dan bisa diterapkan di Kecamatan Pelalawan ini serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan. Dari kegiatan studi kelayakan pengelolaan sampah Kec. Pelalawan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pelalawan layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Pelalawan layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Pelalawan pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 9 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah setidaknya pengelolaan sampah secara 3R (TPS3R). 2. Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Pelalawan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan tempat Pengelolaan sampah secara 3R (TPS3R) 3. Kecamatan Pelalawan telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Induk yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Pelalawan, sedangkan di Kelurahan Pelalawan akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah unit yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPS3R. 4. Lokasi rencana pembangunan TPS3R Kec. Pelalawan yang diusulkan dalam studi kelayakan ini telah memenuhi persyaratan, antara lain; Jumlah KK terlayani &gt; 200 KK; Ketersediaan lahan yang akan diakomodir oleh pemerintah Kecamatan setempat seluas +/- 1.000 m<sup>2</sup>;</p> <p>Calon lokasi lahan TPS3R Kecamatan Pelalawan tidak berada di Garis sempadan sungai (GSS); Calon lokasi lahan TPS3R Kecamatan Pelalawan berada di daerah administrasi Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan; Tersedianya akses jalan yang memadai untuk dilalui oleh truk pengangkut residu TPS3R ke TPA; Memiliki potensi pasar terhadap produk hasil olahan TPS3R.5. Lokasi yang diusulkan dan ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) Kecamatan Pelalawan adalah untuk pelayanan Kelurahan Pelalawan, Desa Delik, Desa Sering, dan Desa Lalang Kabung. 6. Unutk pengelolaan persampahan Desa Kuala Tomas, Desa Ransang, dan Desa Sungai Ara direncanakan akan masuk ke dalam pelayanan persampahan Kecamatan Bunut dikarenakan faktor geografis kecamatan pelalawan di lintasi oleh sungai kampar, dan desa-desa tersebut berada pada bagian selatan sungai dan akses transportasi pelayanan persampahannya lebih dekat ke Kecamatan Bunut. 7. Untuk pelayanan persampahan Desa Batang Nilo Kecil dan Desa Telayap akan diakomodir langsung oleh TPA Kemang dikarenakan letak administratif ke dua desa ini lebih dekat ke lokasi Tempat Pengelolaan Akhir tersebut.</p>	
5.	Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Bunut	<p>Tujuan dari Jasa Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pengelolaan Sampah Kecamatan Bunut adalah untuk mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung dan bisa diterapkan di Kecamatan Bunut ini serta untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan. Dari kegiatan studi kelayakan pengelolaan sampah Kec. Bunut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bunut layak memiliki lokasi dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah khusus untuk skala Kecamatan. Hal-hal lain yang mendukung kelayakan Kecamatan Bunut layak memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah sendiri antara lain; Produksi timbulan sampah domestik Kecamatan Bunut pada tahun 2034 diproyeksi sebesar +/- 33 Ton/hari, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah setidaknya pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Bunut juga melayani timbulan sampah di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan Pada penyusunan dan kajian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Pelalawan 2021-2041, Kecamatan Bunut merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang disarankan untuk pembangunan pengelolaan sampah secara terpadu (TPST). Kecamatan Bunut telah memiliki rencana lokasi tempat pembangunan Bank sampah yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Bank Sampah Induk yang direncanakan berada pada seluruh desa di Kec. Bunut, sedangkan di Kelurahan Bunut akan direncanakan sebagai Titik Bank sampah unit yang mana keseluruhan Bank sampah yang direncanakan dapat menunjang operasional TPST.</p> <p>Lokasi rencana pembangunan TPST Kec. Bunut yang diusulkan oleh pemerintah Kecamatan Bunut tidak memenuhi syarat jarak terhadap pemukiman terdekat dan tidak memenuhi syarat terhadap jarak ke pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Yang mana usulan lokasi pembangunan TPST berjarak +/- 9 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 20 m dari pemukiman terdekat. Untuk syarat jarak dengan pemukiman terdekat tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan jarak terhadap Pusat Pemerintahan Kecamatan dan pemukiman terdekat adalah +/- 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan +/- 500 m dari pemukiman terdekat. Lokasi yang diusulkan dan ideal sesuai dengan acuan kelayakan yang di acu pada kajian ini untuk lokasi calon lahan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Bunut adalah di Desa Merbau yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Teluk Meranti. Pemilihan lokasi di Merbau sebagai area lahan pembangunan TPST Kecamatan Bunut telah mempertimbangkan selidiknya; Lahan terpilih berada di dalam area pelayanan (Kec. Bunut); Jarak area terpilih &gt; 500 m dari pemukiman penduduk terdekat; Jarak area terpilih &gt; 10 Km ke Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kec. Bunut; Kawasan area terpilih tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi. Jarak area terpilih &gt; 10 Km dari sumber air komersial yang digunakan untuk pelayan publik (sumber air UPT SPAM Kec. Bunut); Lahan terpilih berada pada zona lahan yang relatif datar dengan kemiringan; lahan diperkirakan &lt; 20%; Lahan terpilih tidak Berada di dan atau berdekatan dengan kawasan lindung dan cagar budaya .</p>	
6.	Studi Analisa Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci	<p>Tujuan dari studi kebutuhan RTH di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan adalah untuk menghitung kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen serta untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat terhadap rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan hasil analisis dalam kajian studi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :</p> <p>1. Luas RTH di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada tahun 2023 adalah 133,22 Ha dari luas daratan Pangkalan Kerinci yaitu 18.716,16 Ha. Berdasarkan perhitungan kebutuhan RTH menurut jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen, luas RTH eksisting sudah cukup memenuhi kriteria kesediaan RTH. Namun jika dihitung berdasarkan luas wilayah, RTH yang dibutuhkan adalah sebesar 7.432,8 Ha. Berdasarkan sudut pandang ini, RTH Eksisting disimpulkan belum memenuhi 30% dari luas wilayah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan RTH berkelanjutan agar terjadinya keseimbangan ekosistem dan meningkatnya faktor kesejahteraan.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis preferensi masyarakat Pangkalan Kerinci diketahui responden menyatakan setuju (90%) setuju/ mendukung pengembangan RTH di Pangkalan Kerinci. Kemudian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan nilai 97,55 terhadap kehadiran RTH ditengah masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menilai RTH yang sudah tersedia masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan sangat baik.</p>	
7.	Studi Analisis Pengembangan kebijakan hutan kota di Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci	<p>Tujuan dari Studi Kebijakan Pengembangan Hutan Kota di Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci adalah untuk melakukan kegiatan studi mengenai kebijakan hutan kota untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya serta untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan hutan kota. Adapun kesimpulan dari kajian studi ini adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Berdasarkan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci tahun 2023, Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan pada tahun 2022 seluas 603,62 Ha atau 8% dari luas total kawasan. Luas RTH Publik ideal berdasarkan ATR BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH adalah 30% dari luas wilayah. Artinya jumlah RTH di Pangkalan Kerinci belum memenuhi kebijakan yang ada. Penambahan Hutan Kota sebagai seharusnya dapat memenuhi luas ideal.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis preferensi masyarakat, diketahui responden menyatakan memahami pentingnya Hutan Kota dan setuju/ mendukung (90%) pengembangan Hutan Kota di Pangkalan Kerinci. Kemudian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan nilai 97,00 terhadap kehadiran Hutan Kota ditengah masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menilai Hutan Kota yang sudah tersedia masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan sangat baik.</p>	
8.	Studi Analisa Kebutuhan Bank Sampah di Kota Pangkalan Kerinci	<p>Bertujuan untuk : 1. Menyajikan data dan informasi sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penelitian, pembelajaran, pengetahuan atau wawasan pada umumnya. 2. Mengidentifikasi isu prioritas lingkungan hidup dan informasi data secara berkala serta merekomendasikan strategi pemantauan untuk mengatasi isu tersebut. 3. Menggambarkan rumusan dan penerapan kebijakan dan/atau program kerja terkait lingkungan hidup yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam kajian studi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini : Potensi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,58%. Pengelolaan sampah yang dilakukan adalah pengurangan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan pengolahan dengan cara pemroses menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang) dan menjadi sumber energi (seperti briket). Total keseluruhan sampah yang dikelola pada tahun 2023 adalah 93,82% dari total sampah yang masuk. Pengelolaan sampah di Pangkalan Kerinci sudah berjalan sangat baik dan perlu agar dipertahankan untuk masa akan datang. Perhitungan timbulan sampah yang dihasilkan untuk waktu mendatang dapat menjadi acuan dalam merencanakan besar volume sampah yang akan dilayani serta digunakan untuk menghitung kebutuhan akan sarana dan prasarana bagi pengelolannya (SK SNI T-13-1990-F Departemen Pekerjaan Umum, 1990). Dilakukan perhitungan proyeksi timbulan sampah dan komposisi sampah untuk 10 tahun akan datang. Data ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan kebutuhan Bank Sampah di kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci. Tantangan dalam Implementasi Peraturan Bank Sampah Meskipun berbagai peraturan telah dibuat untuk mendukung pengelolaan Bank Sampah, tantangan dalam implementasi tetap ada. Beberapa tantangan tersebut meliputi: a) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Meskipun peraturan sudah ada, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sulit tercapai. b) Koordinasi antar Instansi Pelaksanaan peraturan sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. c) keterbatasan Dana dan Sumber Daya Pengelolaan Bank Sampah sering menghadapi kendala dana dan sumber daya yang terbatas, yang mempengaruhi efektivitas operasional.</p>	
9.	Studi Persepsi Masyarakat Sekolah Terhadap Program Pendidikan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci	<p>Tujuan dari kajian studi Persepsi Masyarakat Sekolah Terhadap Program Pendidikan Lingkungan Hidup antara lain :</p> <p>1. Menyajikan data dan informasi sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penelitian, pembelajaran, pengetahuan atau wawasan pada lingkungan sekolah.</p> <p>2. Menggambarkan rumusan dan penerapan kebijakan dan/atau program kerja di lingkungan sekolah yang direncanakan.</p> <p>3. Mengidentifikasi peran masyarakat sekolah terhadap program Adiwiyata di lingkungan sekolah.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis dalam kajian studi, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat sekolah terhadap program pendidikan lingkungan seperti program Adiwiyata adalah setuju dan mendukung berjalannya program tersebut dengan berperan aktif sesuai dengan status dalam masyarakat sekolah. Responden yaitu masyarakat sekolah menilai Program Adiwiyata masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan sangat baik sesuai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</p>	

10	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2045	<p>Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Pelalawan khususnya rencana teknokratik telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta untuk meningkatkan kualitas RPJPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2045 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Kesimpulan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah dilakukan analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), jumlah indikator yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS) adalah 20 indikator (24%). Indikator TPB yang sudah terlaksana tetapi belum mencapai target adalah 18 indikator (22%), indikator dengan kategori belum terlaksana dan belum mencapai target (BB) adalah 1 indikator (1%), dan indikator dengan kategori tidak ada data (NA) adalah 43 indikator (52%) dari total 82 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Pelalawan.</li> <li>2. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas (Isu PB Prioritas) didapatkan setelah menganalisis tiga kelompok isu, yaitu: Isu berdasarkan konsultasi publik, Isu berdasarkan telah dokumen strategis, isu kesesuaian dengan RPJMD dan Isu berdasarkan Capaian TPB.</li> <li>3. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya akses pelayanan terhadap jaminan kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan dasar yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin.</li> <li>b. Lemahnya sistem mitigasi bencana dan strategi pengurangan risiko bencana c. Belum terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian, ketidastabilan harga pangan dan akses lahan pangan berkelanjutan</li> <li>d. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit tropis, hepatitis, kardiovaskuler, kanker, dan pemapasan kronis</li> </ol> </li> <li>e. Masih tingginya angka putus sekolah jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat</li> <li>f. Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>g. Akses air minum dan sanitasi yang layak belum terwujud, ketersediaan air baku terbatas, serta pengelolaan limbah cair industri lemah.</li> <li>h. Rendahnya rasio elektrifikasi dan layanan gas rumah tangga</li> <li>i. Lemahnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, infrastruktur jalan dan transportasi</li> <li>j. Belum maksimalnya akses pelayanan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, dan rendahnya pendapatan masyarakat</li> <li>k. Rendahnya rasio perluasan lahan pembangunan dan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah</li> <li>l. Target pengurangan jumlah kematian, dampak terhadap masyarakat, dan kerugian ekonomi akibat bencana relatif terhadap PDB global belum tercapai.</li> <li>m. Belum optimalnya penanganan timbunan sampah dan limbah B3</li> <li>n. Belum efektifnya penguatan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam</li> <li>o. Belum terwujudnya pencegahan terhadap konflik penduduk, perdagangan orang, serta lemahnya akses bantuan hukum orang miskin</li> <li>p. Belum optimalnya pengembangan lembaga publik yang efektif, akuntabel, dan transparan, termasuk peningkatan akses terhadap informasi publik dan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan</li> <li>q. Belum tercapainya target pemenuhan kepemilikan akta kelahiran</li> <li>r. Rendahnya pendapatan pemerintah dan penerimaan pajak terhadap PDB</li> <li>s. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan swasta dan badan usaha</li> </ol> <p>4. Hasil dari KLHS akan diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2045.</p>	
11.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2029	<p>Tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, serta selanjutnya diinternalisasikan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tertentu yang telah diidentifikasi dalam proses KLHS RPJMD. Selain itu, penyusunan KLHS RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kualitas RPJMD sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta memberikan kontribusi dalam perbaikan substansi dan materi RPJMD dan Renstra OPD agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pelalawan yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa simpulan utama. Isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pelalawan meliputi rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan masih adanya kerawanan pangan; terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan air minum aman, sanitasi layak, serta sumber air minum yang berkelanjutan; serta rendahnya penanganan terhadap upaya pengurangan risiko bencana, termasuk sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta masih tingginya kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Capaian TPB Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa dari total 220 indikator, sebanyak 34 indikator (15,45%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Sementara itu, terdapat 7 indikator (3,18%) yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan skenario pencapaian target nasional selama periode perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Selain itu, terdapat 4 indikator (1,82%) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta 175 indikator (79,55%) yang belum tersedia atau tidak memiliki data. Indikator-indikator tersebut juga menjadi perhatian dan prioritas dalam perumusan strategi pencapaian target nasional pada periode perencanaan RPJMD selanjutnya.</p> <p>Proses KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan menghasilkan sejumlah isu strategis lintas sektor yang mencerminkan tantangan pembangunan daerah berkelanjutan. Isu-isu strategis tersebut mencakup keterbatasan akses layanan dasar seperti jaminan sosial, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan; rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis; tingginya risiko dan dampak bencana; masih rendahnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat; lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan air, limbah B3, energi terbarukan, dan keanekaragaman hayati; rendahnya daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektor industri dan pariwisata, serta masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; hingga tantangan dalam tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, ketersediaan data, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Secara umum, pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025–2029 telah mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga hasil KLHS diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	
<b>B. Inovasi</b>			
<b>2021</b>			
1	PEDES NASI (PENILAIAN DESA INOVASI)	Program Rutinitas / Tupoksi dari SKPD	
2	SIMPEG (SISTEM MANAJEMEN KEPAGAWAIAN) ONLINE	Program Rutinitas / Tupoksi dari SKPD	
3	LAKU (LAYANAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN TERPADU)		
4	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIM ASET) ONLINE		
5	PBB P2 MELON		
6	SELEMBAYUNG MELAYU ( SELAMATKAN LINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA PASUNG MELALUI PELAYANAN TERPADU)		
7	ANJEP GRATIS ( ANTAR JEMPUT PASIEN RAWAT JALAN GRATIS)		
8	WAK UNGGAL SAKTI (ADO WARGA KITO SUDAH MENINGGAL SEGERA AKTA KEMATIAN TERBIT)		
9	SABER KE PETANG JEBOL (SEMUA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERES KETIKA PETUGAS DATANG JEMPUT BOLA)		
10	SATU BERKAS MINIMAL EMPAT PRODUK ( SABER MEMPRO)		
11	SATU BERKAS MINIMAL EMPAT PRODUK ( SABER MEMPRO)		
12	APLIKASI KIR PELALAWAN BERBASIS ANDROID		

13	PROLIGA GERTAMBE (PRODUKSI LIPAT GANDA MELALUI GERAKAN TANAM CABE 2 HA PER DESA/KELURAHAN)		
14	LAMBE KELING (LAYANAN METODE KB KELILING)		
15	GELAY SI LING LING (GERAK CEPAT PELAYANAN KONSULTASI DAN KONSELING KELILING)		
16	MESIN PEMECAH JAGUNG (HAMMER MILL)		
17	BIO-SIP (PUPUK ORGANIK CAIR)		
18	ALAT PENGHEMAT LISTRIK		
19	ALPRES COCONUT MILK KK		
20	PENCACAH RUMPUT (CR ROZY OK)		
21	ALAT PENERING PINANG		
22	PARUT MULTI GUNA		
23	ROMPI MAGNETIK (ROTIK)		
24	APEL E3 ZI SERBA GUNA		
25	MESIN PEMIPIL JAGUNG		
26	ALAT PEMBELAH PINANG (PACEP)		
27	"MESIN PEMARUT & PENGIRIS E2 (MPP E2)"		
28	DPMPTSP PINTAR (DPMPTSP PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN TERINTEGRASI)		
29	APLIKASI SIBADIK (SISTEM INFORMASI BANTUAN PENDIDIKAN)		
2022			
1	Sistem Absensi Berbasis Online (Siko)		
2	SITANJAK MERAH (Sistem Layanan Pajak Mandiri Bendahara Daerah)		
3	Pulanet		
4	ADIK ATAN ( Apikasi Pendidikan dan Kesehatan		
5	Salav		
6	Bedah Rumah Layak Huni		
7	Genting (Gerakan Anti Stunting)		
8	Penyangga Duafa		
9	BTS SIKI SIMIL ( Beritahu Teman Sesama Siap Nikah Siap Hamil )		
10	Jumat Berkah		
11	Panglimo Basolang		
12	Gerobak (Gerakan Gotong Royong Bersama Kecamatan)		
13	WAK UNGGAL SAKTI		
14	KETI PERI (Kerinci Timur Pelayanan Prima)		
15	Batik Sei. Kijang		
16	Program Sawit Untuk Masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan konsep Collaboration governance (PROWITMAPEL COVER)		
17	Command Centre		
18	Pelalawan Glowing		
19	Klinik Bumdes		
2023			
1	SISTEMAPLIKASI PAJAKKELURAHAN DAN DESA (SIAP PAKDE) UNTUK PPDK		
2	INDAH (IZIN ITU MUDAH)		
3	SATUAN TUGAS PEMBURU PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH (SATGAS BUGAR)		
4	SABO (SISTEM ABSENSI BERBASIS ONLINE)		
5	KLIK PELALAWAN		
6	BUMDES AMANAH		
7	SISTEM INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN (SIDAK)		
8	KARTU ANTRIAN PRIORITAS KITA BERSAMA (KARISMA)		
9	SERUAN ARISAN ULANG TAHUN KITA BERSAMA ( SERSAN ULTIMA )		
10	1 UPDATE STATUS APABILA ADA PERKAWINAN (USABAPER)		
11	LURING (LURAH KELILING)		
12	SMART SERVICE		
13	SILAJANG "SISTEM LAYANAN ANTAR JEMPUT SENANG"		

14	"TANJAKDEWA"(TANPAJARAKD ENGANPASIE JIWA)		
15	MASYARAKAT KERUMUTAN PEDULI STUNTING (MASKER PENTING)		
16	ELEKTRONIKBANTUANLANGSU NGTUNAI DANA DESA (E-BLT-DD)		
17	SEKOLAH DIGITAL		
18	SATUSEMESTERBAYIDATANGD APATKADODARI POSYANDU (SEBATANG KAYU)		
19	LAYANAN ADMINDUK		
20	GERAKAN ANTI STUNTING (GENTING)		
21	AMBULAN BIDAN KELILING (A- BILING)		
22	PELAYANANINFORMASIDATAN UANSAGADGET KARTU KELUARGADAN PENDUDUK ( PINDANG KAKAP )		
23	PEMBUATAN APLIKASI BARCODE (BANSEI EXAMBRO) DALAMPROSESPEMBELAJARA NDAN ASESMEN (UJIAN ONLINE)		
24	MAINAN TRADISIONAL KEMBANGKAN BAKAT ORANGTUA JUGA ANAK (MANTRA KAMBOJA)		
25	PENYANGGA KAUM DHUAF		
26	GERAKAN GTT (GREBEK TANGKAP TINDAK)		
27	KOMUNITAS PEMUDA PELAJAR KREATIF (KOOPELATIF)		
28	CAMAT SEKOLAH		
29	"LOPE ( LOSUNG PEMBANGUNAN DAN EDUKASI )"		
30	SANG PEMIMPI (PERSIAPAN MILENIAL MASUK PERGURUAN TINGGI )		
31	LAYANAN ADMINISTRASI MALAM (LAM)		
32	BER-BER ANTING ( BERGERAK BERSAMA ANTISIPASI STUNTING )		
33	SEKOLAH BERBUDAYA MELAYU		
34	ADA JEMBATAN BUMI ANGKASA (ANTAR DAN		
35	"ASETKU LUSIE" (ANAK SEHAT KELUARGA UNGGULAN; LULUS ASI EKSKLUSIF)		
36	PAKOMOR JALAN (PANTAU KOMORBIT DAN JAGA LANSIA)		
37	POSBINDUTERINTEGRASI POSYANDUBALITADAN POS USILA (POS TANPA BASI)		
38	BESI BAJA (BEBAS SAKIT BAHAGIA SEJAHTERA LANSIA)		
39	POLI KESEHATAN PEDULI ORANG TUA (POLKADOT)		
40	ARAH TESSO NILO (AGROFORESTRY RAMAH GAJAH DI TESSO NILO)		
41	GEMBALA ( GERAKAN MEMBACA DI LAPANGAN)		
42	BAPAK/IBU ANGKAT ANAK YATIM		
43	RPDS (RELAHAN PENGALANGAN DANA SOSIAL)		
44	TAMAN BACA LANGIT KE-7		
45	PELALAWAN SEJUK		
46	MONKEY FOREST		
47	SMOOTING (SOSIALISASI DAN DEMO STUNTING)		
48	PUTRI DAN JERI (PEMBUATAN PUPUK DARI RUMPUT LIAR DAN JERAMI PADI)		
49	4 IN 1 CONTROLLING SYSTEM		
50	WIRUSAHA SAYURAN		
51	FASIH		
52	GENERASI JAGA WARGA (SIAGA)		

53	KEBUN ANAK YATIM		
54	GERAKAN MENATA KELAS DAN TAMAN (GEMEKTA)		
2023			
1	SISTEM APLIKASI PAJAK KELURAHAN DAN DESA (SIAP PAKDE) UNTUK PPDK		
2	INDAH (IZIN ITU MUDAH)		
3	SATUAN TUGAS PEMBURU PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH (SATGAS BUGAR)		
4	SABO (SISTEM ABSENSI BERBASIS ONLINE)		
5	KLIK PELALAWAN		
6	BUMDES AMANAH		
7	SISTEM INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN (SIDAK)		
8	KARTU ANTRIAN PRIORITAS KITA BERSAMA (KARISMA)		
9	SERUAN ARISAN ULANG TAHUN KITA BERSAMA ( SERSAN ULTIMA )		
10	1 UPDATE STATUS APABILA ADA PERKAWINAN (USABAPER)		
11	LURING (LURAH KELILING)		
12	SMART SERVICE		
13	SILA JANG "SISTEM LAYANAN ANTAR JEMPUT SENANG"		
14	"TANJAKDEWA"(TANPA JARAK DAN ENGAPASIE JIWA)		
15	MASYARAKAT KERUMUTAN PEDULI STUNTING (MASKER PENTING)		
16	ELEKTRONIK BANTUAN LANGSUNG NGTUNAI DANA DESA (E-BLT-DD)		
17	SEKOLAH DIGITAL		
18	SATU SEMESTER BAYI DATANG DAN APAT KADODARI POSYANDU (SEBATANG KAYU)		
19	LAYANAN ADMINDUK		
20	GERAKAN ANTI STUNTING (GENTING)		
21	AMBULAN BIDAN KELILING (A-BILING)		
22	PELAYANAN INFORMASI DAN UANG AGADGET KARTU KELUARGA DAN PENDUDUK ( PINDANG KAKAP )		
23	PEMBUATAN APLIKASI BARCODE (BANSEI EXAMBRO) DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN ASESMEN (UJIAN ONLINE)		
24	MAINAN TRADISIONAL KEMBANGKAN BAKAT ORANG TUA JUGA ANAK (MANTRA KAMBOJA)		
25	PENYANGGA KAUM DHU'AFA		
26	GERAKAN GTT (GREBEK TANGKAP TINDAK)		
27	KOMUNITAS PEMUDA PELAJAR KREATIF (KOOPELATIF)		
28	CAMAT SEKOLAH		
29	"LOPE ( LOSUNG PEMBANGUNAN DAN EDUKASI )"		
30	SANG PEMIMPIS (PERSIAPAN MILENIAL MASUK PERGURUAN TINGGI )		
31	LAYANAN ADMINISTRASI MALAM (LAM)		
32	BER-BER ANTING ( BERGERAK BERSAMA ANTISIPASI STUNTING )		
33	SEKOLAH BERBUDAYA MELAYU		
34	ADA JEMBATAN BUMI ANGKASA (ANTAR DAN JEMPUT BAYI, BALITADAN IBUHA MILANGKUTAN SELALU ADA)		



35	"ASETKU LUSIE" (ANAK SEHAT KELUARGA UNGGULAN; LULUS ASI EKSKLUSIF)		
36	PAKOMOR JALAN (PANTAU KOMORBIT DAN JAGA LANSIA)		
37	POSBINDUTERINTEGRASI POSYANDUBALITADAN POS USILA (POS TANPA BASI)		
38	BESI BAJA (BEBAS SAKIT BAHAGIA SEJAHTERA LANSIA)		
39	POLI KESEHATAN PEDULI ORANG TUA (POLKADOT)		
40	ARAH TESSO NILO (AGROFORESTRY RAMAH GAJAH DI TESSO NILO)		
41	GEMBALA ( GERAKAN MEMBACA DI LAPANGAN)		
42	BAPAK/IBU ANGKAT ANAK YATIM		
43	RPDS (RELAWAN PENGALANGAN DANA SOSIAL)		
44	TAMAN BACA LANGIT KE-7		
45	PELALAWAN SEJUK		
46	MONKEY FOREST		
47	SMOOTING (SOSIALISASI DAN DEMO STUNTING)		
48	PUTRI DAN JERI (PEMBUATAN PUPUK DARI RUMPUT LIAR DAN JERAMI PADJ)		
49	4 IN 1 CONTROLLING SYSTEM		
50	WIRUSAHA SAYURAN		
51	FASIH		
52	GENERASI JAGA WARGA (SIAGA)		
53	KEBUN ANAK YATIM		
54	GERAKAN MENATA KELAS DAN TAMAN (GEMEKTA)		
<b>2024</b>			
1	GARPU BALI (Gerakan Antar Jemput Bayi dan Balita)		
2	AKSI SARAPAN SEHAT SMPN TIGA (AKSARA SEHATI)		
3	ONE STOP SERVICE (OSS) LANSIA		